

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM 100-0-100 YANG RESPONSIF GENDER DI KELURAHAN JARAKSARI KOTA WONOSOBO

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM IN GENDER RESPONSIVE 100-0-100 JARAKSARI VILLAGES CITY WONOSOBO

Oleh : Faizal Haryanto dan Nur Hidayah M.Si

Email : Faizalharyanto97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui program 100-0-100 dan penerapan responsif gender dalam program pemberdayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari pihak fasilitator dan anggota LKM dan KSM sebagai lembaga pelaksana program 100-0-100, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan dengan teknik *triangulasi*. Pada bagian analisis data menggunakan tahap analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian dalam program pemberdayaan 100-0-100 terkait masalah air, lingkungan kumuh, dan sanitasi dapat dikatakan program sudah terlaksana dengan baik. Tetapi, walaupun program ini berbasis pemberdayaan, dalam pelaksanaan masyarakat masih sangat bergantung terhadap pemerintah baik dari segi program maupun dana. Sehingga dapat dikatakan masyarakat belum sepenuhnya berdaya. Terkait penerapan responsif gender dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap responsif gender dari segi keterlibatan perempuan saja tanpa melihat aspek lainnya. Selain itu keterlibatan perempuan juga masih sekedar pemenuhan kuota ketentuan 30% keterlibatan perempuan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Laki-Laki, Perempuan, Responsif Gender.*

ABSTRACT

This study aimed to describe the community empowerment through gender-responsive 100-0-100 and implementation in the empowerment program. This study uses a descriptive qualitative method. Subjects in this study amounted to 6 people consisting of the facilitator and member LKM and KSM to be the implementing agency 100-0-100 program, informants selection using purposive sampling technique. Data collected by observation, interview, and documentation. The validity of the data used by the triangulation technique. In the analysis of data using analysis phase Miles and Huberman. The research results in the empowerment program 100-0-100 water-related issues, seedy neighborhood, and sanitation can be said the program has been carried out well. However, although the program is based on empowerment, in the implementation of the community continues to rely on the government in terms of both programs and funds. That is to say, the public has not completely powerless. Related to the implementation of gender-responsive can be said to have not absolutely fulfilled properly. This is because people still think in terms of gender-responsive involvement of women without seeing other aspects. Besides the involvement of women is still a 30% quota should provision the involvement of women.

Keywords: *Empowerment, Men, Women, Gender Responsive.*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya isu kesetaraan dan keadilan gender telah lama menjadi perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Masalah keadilan dan kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari proses perjuangan hak-hak asasi manusia yang termanifestasi dalam *declaration of human rights (HAM) PBB 1948*. Pengarusutamaan gender menjadi strategi yang mewarnai berbagai kebijakan di setiap bidang pembangunan. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan merupakan usaha yang sinergis yang diarahkan dan tercermin pada keluaran kebijakan pembangunan (Rina & Abdul, 2017:133).

Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan dikalangan organisasi non pemerintah membicarakan masalah gender ini (Rina & Abdul, 2017:133). Adanya Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri atau Kepala lembaga non Kementerian, Gubernur dan Bupati atau Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Sama halnya di kelurahan Jaraksari dalam hal

pembangunan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dan juga menerapkan pengarusutamaan gender tersebut. Salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program 100-0-100 yang responsif gender.

Program 100-0-100 ini berkaitan dengan program pemerintah yaitu program Kota Bebas Kumuh. Jadi program ini merupakan program intruksi dari pemerintah pusat kepada seluruh kabupaten maupun kota untuk membuat kota bebas dari kawasan kumuh. Kemudian bupati Wonosobo memberikan intruksi untuk seluruh kelurahan dan desa membuat program yang mendukung terwujudnya Kota Wonosobo bebas kawasan kumuh. Dimana program yang dilaksanakan terfokus terhadap 3 aspek yaitu masalah kebutuhan air, penanganan lingkungan kumuh dan juga sanitasi yang kemudian diberi nama 100-0-100. 100-0-100 memiliki arti yaitu 100% air minum teratasi, 0% pemukiman kumuh, dan 100% sanitasi. Hal yang membedakan program kota bebas kumuh atau KOTAKU di Wonosobo dengan kota lain adalah mereka berbasis responsif gender, karena tidak semua program KOTAKU berbasis gender. Peneliti ingin melihat responsif gender ini diterapkan dalam program 100-0-100 didalam

masyarakat, hal ini mendorong untuk melakukan kajian terkait penerapan PUG dalam sebuah pemberdayaan masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengarusutamaan Gender dan

Responsif Gender

Pengarusutamaan gender sudah bukan menjadi barang yang asing dalam dunia pemerintahan Indonesia. Adanya Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, sekarang banyak program-program pemerintah di segala bidang mengandung unsur gender salah satunya responsif gender terutama dalam hal pembangunan di dalam masyarakat. Pengarusutamaan gender sendiri yaitu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda atau difabel, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional

dan daerah (Mastuti & Kemal, 2010:xii). Jadi yang menjadi target bukan hanya sekedar permasalahan laki-laki dan perempuan namun lebih kompleks dari hal tersebut.

Responsif gender sendiri merupakan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender. Kemudian hal tersebut menjadi dasar diadakannya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender (Mastuti & Kemal, 2010:xiv).

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program 100-0-100 Yang Responsif Gender

Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya power yang dimiliki obyek. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan: politik, hukum, pendidikan

dan lain sebagainya. Pemberdayaan itu sendiri mengandung tiga kekuatan (*power*) di dalam dirinya, yakni *power to*, yaitu kekuatan untuk berbuat; *power with*, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan *power-within*, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia (Efri & Sitti, 2016:207).

Menurut Srihartini dalam (Nadya, 2008:34) memberdayakan masyarakat diartikan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat melalui program 100-0-100 yang responsif gender merupakan program kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo terkait kebutuhan air, kawasan kumuh, dan juga sanitasi. Kemudian dilambangkan dengan simbol 100% air, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi. Makna 100% air sendiri memiliki harapan bahwa kedepannya semua kebutuhan air sudah dapat terpenuhi dan tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan. Begitu juga terkait 0% kumuh dimana dengan adanya program tersebut masalah lingkungan kumuh dapat teratasi semua. Sedangkan 100% sanitasi sendiri mengacu pada pola hidup dan lingkungan masyarakatnya

dengan harapan bahwa masyarakat memiliki sistem sanitasi yang baik

3. Gender Analysis Pathway (GAP)

Analisis gender yang akan digunakan yaitu analisis gender model Gender Analysis Pathway (GAP). Metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan mulai perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Berikut penjelasan dari keempat faktor:

- a. Faktor akses. Ingin melihat dalam perencanaan dan pembangunan yang dikembangkan telah memberi pertimbangan untuk memberi akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) dalam memanfaatkan atau memperoleh sumber-sumber daya pembangunan.
- b. Faktor manfaat. Berusaha untuk menganalisis perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Sama dengan keterangan yang di atas, yaitu karena peran gender yang berbeda, maka apa yang dianggap bermanfaat bagi laki-laki, belum tentu dianggap bermanfaat bagi perempuan (Sardjunani, 2007:3).

- c. Faktor partisipasi. Melihat keikutsertaan dan suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau suara perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan dan terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
- d. Faktor kontrol. melihat perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan. (Sardjunani, 2007:4).

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kelurahan Jaraksari yang terletak di kecamatan Kota Wonosobo.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Desember 2018 - Januari 2019.

3. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif deskriptif sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program 100-0-100 yang responsif gender. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif penulis bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam

masalah penelitian yaitu mendeskripsikan kejadian empiris mengenai program tersebut (Moleong, 2014:5).

4. Sumber Data

Pada dasarnya data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Secara umum data terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dimana data tersebut diambil langsung oleh peneliti kepada sumber secara langsung melalui informan (Moleong, 2014:5).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data dalam penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan tema atau kajian yang sama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ternik pengumpulan data ini sebagai cara untuk memperoleh data dilapangan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan

penelitian yang akan dilakukan maka dilakukan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (Rosadi, 2012:31). Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan mengamati terkait pemberdayaan masyarakat melalui program 100-0-100 yang responsif gender. Observasi dilakukan pada Sabtu 29 Desember 2018, Jumat 04 Januari 2019, dan Selasa 15 Januari 2019.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Teknik wawancara ini digunakan ketika seseorang ingin mendapatkan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah dibuat (Rosadi, 2012:32).

Wawancara yang dilakukan pada penelitian adalah wawancara terstruktur dan juga terarah. Maka dari itu dalam penelitian ini dibuat instrumen wawancara dalam bentuk pertanyaan tertulis. Teknik ini

digunakan untuk menjangking data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga tidak terlalu melebar dari pembahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 6 orang yaitu perwakilan dari 1 fasilitator, 1 lembaga keswadayaan masyarakat, dan juga 4 kelompok swadaya masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian lebih kepada pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan (Rosadi, 2012:32). Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa data-data dari kelurahan seperti jumlah penduduk dan lain sebagainya dan juga foto-foto dokumentasi kegiatan.

6. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu teknik yang bertujuan untuk menjangking sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber (Moleong, 2007:204). Dalam teknik tersebut dibuat kriteri atau pertimbangan tertentu, dalam hal ini kriteria yang diambil yaitu warga kelurahan Jaraksari yang mengikuti program tersebut baik laki-laki dan juga perempuan, selaiitu juga pemerintah

kelurahan Jaraksari terutama penanggung jawab program tersebut atau pejabat yang terkait.

a. Validitas Data

Pemeriksaan atau validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk menguji apakah data dalam penelitian ini valid atau tidak maka akan dibandingkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam hasil wawancara pun dapat dibandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Begitu juga dalam studi dokumentasi dapat pula dibandingkan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik milik Miles dan Huberman yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data/interpretasi hasil analisis, dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Program pemberdayaan 100-0-100

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah

upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat (Silvia, 2015).

Program 100-0-100 dilakukan di 5 kelurahan Kabupaten Wonosobo yang mendapatkan SK kumuh dari bupati, dengan adanya SK ini menjadi landasan dari pemberdayaan yang akan dilakukan. Program ini memfokuskan untuk menangani masalah kawasan kumuh di kota Kabupaten Wonosobo. Program 100% air bertujuan untuk menanggulangi masalah kebutuhan air bersih, karena masih ada masyarakat yang belum memiliki akses air bersih yang layak, karena air merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Terkait 0% permukiman kumuh bermaksud untuk menangani masalah lingkungan kumuh hingga

ketingkat kelurahan, artinya dengan adanya program tersebut masalah lingkungan kumuh dapat teratasi hingga sampai tingkat yang paling bawah yaitu kelurahan. Program yang dijalankan berbasis pada setiap kelurahan.

Terkait masalah lingkungan kumuh program-program lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan dan penataan lingkungan, selain itu dalam hal ini juga dilaksanakan program tanggap bencana dikawasan lingkungan kumuh. Program 100% sanitasi seperti yang sudah disinggung diatas bahwa program ini bertujuan untuk memberikan akses sanitasi layak. Hal ini dikarenakan kebanyakan kawasan kumuh yang ada memiliki sistem sanitasi yang sangat buruk sehingga menyebabkan lingkungan terkesan kumuh dan juga tidak sehat.

2. Tahapan Program Pemberdayaan 100-0-100.

a. Sosialisasi Program

Pemberdayaan 100-0-100

Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dan juga oleh lembaga Keswadayaan Masyarakat atau LKM. Pada proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LKM dibantu oleh tim fasilitator, LKM ini memiliki peran

sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. LKM juga sebagai lembaga yang mengontrol jalanya program pemberdayaan. Tugas LKM juga untuk mencairkan dana pemberdayaan dari pemerintah.

Fasilitator bertugas untuk mensosialisasikan, membantu dan mengajarkan program pemberdayaan ini dari tahap perencanaan, penyusunan, dan juga pelaksanaan. Sosialisasi tahap pertama di kelurahan Jaraksari dilakukan di balai kelurahan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW, ibu-ibu PKK, serta ibu-ibu pengurus posyandu. Bukan hanya mengundang tokoh masyarakat pihak fasilitator juga mengundang perwakilan dari perempuan ataupun laki-laki yang dinilai mampu menjadi penggerak didalam masyarakat, hal ini dikarenakan dalam program ini berbasis gender, jadi hal ini harus disampaikan ke pihak perempuan dan juga laki-laki agar mereka dapat terlibat dalam program yang akan dilaksanakan.

Sosialisasi program ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, hal ini bertujuan agar masyarakat benar-benar memahami terkait program yang akan dijelaskan dan masyarakat juga sadar bahwa pemberdayaan ini penting bagi lingkungannya sendiri selain itu sosialisasi ini bisa dijadikan sebagai alat

kontrol dan juga evaluasi. Sosialisasi ini mempunyai beberapa pembahasan yang akan disampaikan sehingga tim fasilitator dibagi menjadi beberapa bagian tim yakni fasilitator sosial yang bertugas mengurus masalah terkait sosial salah satunya masalah responsif gender ini dan juga keterlibatan perempuan, fasilitator urban *planner* yang bertugas untuk membantu masyarakat merancang program-program yang akan dijalankan agar sesuai dengan kebutuhan, fasilitator teknik yang membantu dalam hal pelaksanaan program dan yang terakhir fasilitator ekonomi yang mengurus masalah pembukuan dan juga mengajarkan bagaimana membuat laporan dan lain-lain.

Setelah sosialisasi tersebut terlaksana maka akan diselenggarakan sosialisasi ulang sekaligus pengajaran sesuai dengan kebutuhan program yang akan dilaksanakan. Sosialisasi ini biasanya sering disebut sebagai MP2K. Setelah dilakukan sosialisasi tahap pertama maka masyarakat akan membentuk Kelompok swadaya masyarakat atau KSM. KSM sendiri bertugas untuk merancang, menyusun, dan menjalankan program pemberdayaan dilingkungan RT masing-masing, selain itu KSM juga sebagai penggerak didalam masyarakat. KSM di kelurahan Jaraksasi

dibagi menjadi 2 jenis KSM yaitu KSM pengadaan dan KSM infrastruktur. KSM pengadaan bertugas untuk mengurus hal-hal terkait keperluan program pemberdayaan seperti pengadaan grobak sampah dan pengadaan alat pemadam kebakaran, sedangkan KSM infrastruktur sebagai pelaksana program-program pemberdayaan.

b. Rancangan dan Penyusunan Program Pemberdayaan 100-0-100 yang Responsif Gender

Perencanaan dan penyusunan program ini dilakukan setelah diadakannya sosialisasi dari pihak tim fasilitator, kemudian masyarakat diperbolehkan untuk merancang dan menyusun programnya sesuai kebutuhan masing-masing yang biasanya dilakukan melalui musyawarah. Masyarakat akan mengajukan usulan rancangan tersebut kepada Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM), kemudian LKM dan KSM akan membuat skala prioritas terlebih dahulu program mana yang akan dijalankan.

Apabila telah melalui tahap seleksi maka program yang sudah disetujui akan diberitahukan kepada masyarakat untuk dilakukan penyusunan dan perencanaan program yang harus melibatkan perempuan dan laki-laki sehingga dana yang diperlukan diketahui. Sebelum program tersebut dilaksanakan, maka program tersebut

akan dilakukan pengecekan ulang yang akan dilaksanakan dalam kegiatan musyawarah pelaksanaan program kegiatan atau MP2K. MP2K digunakan untuk mengecek kesiapan dari KSM untuk melaksanakan program dari segi rancangan maupun sumberdaya manusianya, selain itu juga untuk mengecek apakah perempuan terlibat dalam program tersebut atau tidak.

c. Pelaksanaan Program Pemberdayaan

1) Program 100% Air

Program 100% air merupakan salah satu program KOTAKU untuk menangani masalah kebutuhan air. Kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi berbagai lapisan masyarakat, oleh karena itu air bersih yang berkualitas akhirnya menjadi suatu tuntutan masyarakat saat ini karena segala aktifitas masyarakat diberbagai aspek kehidupan memerlukan air bersih.

Berdasarkan SK bupati maka dibentuklah program air bersih di kelurahan Jaraksari, harapanya kebutuhan air di kelurahan Jaraksari dapat terpenuhi yang kemudian dilambangkan dengan 100% air. Program ini diutamakan bagi masyarakat yang belum berlangganan PDAM. Hal ini dikarenakan program ini hanya bertujuan untuk membantu masyarakat

agar berlangganan air PDAM dengan uang subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Ini dikarenakan sebagian masyarakat sudah berlangganan PDAM.

Penanganan masalah kebutuhan air sudah dapat dikatakan hampir selesai. Program ini sudah memiliki progress sebesar 98%, dimana artinya hampir semua kebutuhan air sudah dapat terpenuhi. Berdasarkan observasi dilapangan juga menunjukan hanya sebagian warga yang belum berlangganan PDAM dari 12 RW hanya masyarakat di RW 1,2, dan 5 yang sebagian kecil belum berlangganan. Walaupun program ini bekerja sama dengan PDAM, ada juga salah satu KSM yang membuat saluran pipa air bersih melalui sumber mata air yang ada, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada PDAM.

2) Program 0% Kumuh

Di kelurahan Jaraksari sendiri untuk mengatasi masalah lingkungan kumuh lebih fokus terhadap infrastruktur seperti pembangunan jalan-jalan dan juga gorong-gorong. Terkait masalah infrastuktur ini yang memiliki andil besar yaitu KSM Infrastruktur. KSM infrastruktur memiliki beberapa tugas dalam masalah pelaksanaan program, sebagai penyedia logistik, penggerak masyarakat, dan pelaksana. Program pavingisasi dalam program ini yaitu

membangun jalan-jalan paving di gang-gang warga, tidak hanya paving biasa, paving yang digunakan juga memiliki pola atau corak agar terlihat lebih indah, hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesan kumuh di lingkungan tersebut.

Program ini berjalan selama dua tahun sudah dapat mengatasi masalah kawasan kumuh terkait jalan paving sebesar 20 hektar dari jumlah 30 hektar kawasan kumuh. Ini menunjukkan bahwa program ini memiliki progres yang cukup baik dimana dengan rentan waktu 2 tahun sudah hampir menyelesaikan masalah terkait kumuh hingga lebih 50%. Bukan hanya program yang berbentuk infrastruktur dalam mengatasi masalah kumuh juga terdapat program terkait kebersihan lingkungan dan juga penanggulangan masalah bencana di kawasan kumuh. Penanganan masalah lingkungan ada beberapa program yaitu pengadaan grobak sampah dan juga pengelolaan limbah sampah.

Ada beberapa KSM yang mendirikan bank sampah untuk mengelolah sampah agar dapat menghasilkan uang atau pendapatan sebagai kas KSM, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala terutama dalam kepengurusan bank sampah. Hal ini dikarenakan banyak warga yang memiliki kesibukan sehingga

kepengurusan bank sampah terkendala. Bukan hanya masalah kesibukan sebenarnya yang menjadi faktor utama terkendalanya program pengelolaan sampah ini masih ada masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan. Mereka lebih terfokus dalam hal pembangunan dari pada hal pemeliharaan lingkungan.

Program untuk mengatasi bencana di kawasan kumuh LKM dan KSM Jaraksari membuat program pelatihan pemadaman kebakaran. Pelatihan ini dilakukan karena bencana yang sering terjadi di kawasan padat penduduk dan juga kawasan kumuh adalah kebakaran. Program ini dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 dilakukan di balai kelurahan Jaraksari. Peserta yang ikut dalam program ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Walaupun ini berkaitan dengan bencana dan juga cenderung pekerjaan berat, program ini diwajibkan untuk melibatkan perempuan. Diharapkan perempuan juga bisa memiliki keahlian dan juga pengetahuan terkait penanggulangan bencana kebakaran.

Hal yang menjadi problem, masih ada sebagian wilayah yang belum merasakan dampak dari pemberdayaan tersebut dikarenakan keterbatasan dana dan swadaya dari masyarakat. Tim fasilitator juga mengatakan bahwa

masyarakat belum sepenuhnya berdaya karena mereka masih sangat tergantung dengan uang pemberian pemerintah sehingga belum sepenuhnya mandiri.

3) Program 100% Sanitasi

Dikelurahan Jaraksari program untuk menangani masalah sanitasi ini yang pertama yaitu jambanisasi. Program jambanisasi sendiri ini merupakan program lanjutan dari program PNPM. Program ini bertujuan untuk merubah pola hidup sehat masyarakat. Pola hidup sehat ini yaitu masyarakat tidak lagi MCK disungai, dulu sebelum program ini dijalankan masih banyak masyarakat yang melakukan aktifitas MCK disungai. Program KOTAKU ini dilanjutkan dengan membangun jamban di setiap rumah-rumah warga yang belum memiliki jamban septitank.

Program ini basisnya adalah rumah, dalam pembuatan jamban ini juga dibuat kriteria-kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan ini. Bukan hanya itu dalam program ini dibuat septitank komunal dan juga wc umum. Adanya septitank komunal ini menjadi salah satu trobosan yang sangat bagus, karena dengan keterbatasan lahan untuk membuat septitank yang diakibatkan padatnya rumah-rumah penduduk sehingga sulit untuk membuat septitank disetiap rumah-rumah. Program yang kedua yaitu pembuatan drainase untuk

mengatasi masalah genangan air dan juga banjir saat hujan, dalam program ini masyarakat membangun drainase berupa pipa-pipa disetiap rumah warga. Masyarakat juga membangun gorong-gorong saluran air agar air dapat mengalir ke sungai terdekat.

Berjalannya program ini telah banyak mengubah pola hidup masyarakat. Sekarang masyarakat sudah banyak yang sadar terkait masalah kesehatan lingkungan terutama terkait masalah MCK. Adanya program ini juga dapat meminimalisir masalah banjir yang sering terjadi ketika hujan terjadi. Masalah bau sungai yang tidak enak ketika musim kemarau juga sudah sedikit teratasi.

Pada dasarnya program 100-0-100 berbasis pada pemberdayaan masyarakat, namun disini tidak semua program berasal dari masyarakat itu sendiri. Artinya disini pemerintah masih memegang andil dalam program pemberdayaan. Ada sebagian program yang berasal dari pemerintah dan sudah ditentukan sehingga dapat dikatakan masih bersifat *top down* seperti pelatihan pemadaman kebakaran dan juga subsidi PDAM, tetapi juga beberapa program berasal dari masyarakat itu sendiri, artinya masyarakat yang merancang dan menyusun sesuai dengan kebutuhannya sendiri atau sering disebut *bottom up*

seperti pengelolaan sampah dan juga pembangunan pipa air bersih. Demikian program pemberdayaan ini masih bersifat *top down* dan juga *bottom up*.

Pemberdayaan yang dilakukan juga terdapat batasan yaitu hanya terkait masalah air, lingkungan kumuh dan juga sanitasi. Adanya ketentuan tersebut juga bisa jadi menjadi salah satu penghambat perkembangan masyarakat karena mereka hanya terfokus dengan masalah penanganan kawasan kumuh dan melupakan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang justru lebih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan penuturan tim fasilitator, dengan adanya keterlibatan pemerintah secara aktif dalam program mengakibatkan mereka memiliki ketergantungan terhadap pemerintah sehingga mereka tidak melakukan swadaya sendiri dan hanya bergantung pada dana dan juga pada program pemerintah.

3. Penerapan Responsif Gender Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program 100-0-100

Melihat penerapan responsif gender dalam program pemberdayaan 100-0-100 apakah masih ada kesenjangan gender dalam program digunakan analisis gender model Gender Analysis Pathway (GAP). Model GAP sendiri merupakan metode analisis

untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan mulai perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Terkait manfaat sendiri terkait hasil dari pemberdayaan yang sudah dibahas diatas, apakah manfaat sudah didapat oleh semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dari segi akses, partisipasi, dan kontrol akan dibahas sebagai berikut:

a. Segi Akses

Tahapan sosialisasi akses bagi perempuan maupun laki-laki sudah dikatakan setara, karena dalam pelaksanaan sosialisasi mereka mengundang perwakilan laki-laki dan perempuan disetiap RT. Mengundang perwakilan antara laki-laki dan perempuan tersebut menandakan bahwa program ini dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan sehingga tidak menimbulkan opini bahwa program ini hanya untuk kalangan tertentu. Dalam MP2K keterlibatan perempuan dan juga laki-laki dapat dikatakan sama dilihat dari segi jumlah. Ini menandakan dalam hal akses sudah dapat dikatakan setara.

Lembaga yang menjalankan pemberdayaan terkait akses, terdapat peraturan yang mengatur terkait keterlibatan perempuan. Keterlibatan

perempuan di atur oleh pemerintah dimana harus melibatkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan, dapat dilihat bahwa kesetaraan gender sangat diutamakan. Di kelurahan Jaraksari keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan LKM sudah cukup seimbang, hal ini berarti 30% ketentuan sudah terpenuhi. Anggota LKM Sinergi berasal dari pemerintah kelurahan dan masyarakat sebanyak 19 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Begitu juga dalam keanggotaan KSM, dimana pada keanggotaan KSM Pengadaan maupun KSM Infrastruktur keterlibatan perempuan antara 2-3 orang. Hal ini sudah lebih dari 30% dari jumlah anggota rata-rata berjumlah 5-10.

Secara kepengurusan jika dilihat dari segi akses sudah merata antara laki-laki dan perempuan, namun semua itu belum bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat atau hanya orang-orang tertentu yang terlibat. Hal ini karena pemilihan anggota LKM dilakukan tertutup, pemilihan ini dilakukan dengan cara penunjukan oleh pihak kelurahan dan juga perwakilan dari masyarakat, maka hanya orang-orang yang dianggap berkompeten dalam bidangnya dan juga yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kelurahan yang bisa menjadi anggota LKM. Proses

penunjukan dan bukan musyawarah bisa menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin bergabung, sehingga ini membatasi kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan khususnya dalam kepengurusan LKM.

Di KSM sendiri juga terjadi penunjukan anggota terutama dalam KSM pengadaan yang semua anggotanya dipilih melalui penunjukan. Untuk KSM infrastruktur dalam pemilihan keanggotaan sudah dilakukan dengan musyawarah walaupun ada beberapa anggota yang melakukan penunjukan karena kurang minatnya masyarakat khususnya perempuan dalam hal keanggotaan KSM. Pada umumnya anggota perempuan yang ikut KSM infrastruktur dikarenakan penunjukan bukan karena hasil musyawarah. Adanya penunjukan hal tersebut juga berdampak kepada partisipasi perempuan dalam kepengurusan. Jika dilihat dari program pemberdayaannya, untuk masalah akses bersifat general. Artinya program ini bisa dinikmati semua kalangan masyarakat jaraksari. Terkait program pemberdayaan masalah lingkungan kumuh dan juga sanitasi dalam hal akses sama seperti program air bersih yang bersifat general untuk semua masyarakat.

b. Segi Partisipasi

Partisipasi perempuan dapat dilihat terutama dalam pencairan dana.

Keterlibatan perempuan dapat dilihat dalam surat pencairan dana yang diajukan oleh masyarakat melalui KSM, surat tersebut harus ditandatangani oleh perempuan dan juga laki-laki sejumlah 3 orang, baik itu laki-laki 2 orang dan perempuan satu orang ataupun sebaliknya. Tandatangani disurat pencairan dana, proses pengambilan dana juga harus disaksikan oleh pihak laki-laki dan juga perempuan seperti yang dilakukan saat MP2K bulan Januari terkait pelatihan pemadaman kebakaran.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam hal kepengurusan LKM dan KSM, dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari anggota KSM terutama perempuan yang ikut kepengurusan karena penunjukan bukan hasil musyawarah. Adanya penunjukan seperti ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan secara sukarela karena keinginan sendiri masih sedikit, hal ini berakibat pada keaktifan mereka dalam KSM. bukan karena penunjukan saja, kurang aktifnya anggota KSM juga dikarenakan perasaan kurang mampu untuk menjadi anggota KSM, ketakutan tersebut menjadi penghambat dalam keikutsertaan perempuan dalam anggota KSM.

Seiring berjalanya waktu sudah mulai banyak perempuan yang bergabung didalam KSM walaupun

belum semuanya, karena ada dua KSM yang mengalami kemunduran terkait partisipasi perempuan. Walaupun keterlibatan perempuan sudah semakin banyak baik di LKM maupaun KSM, suara laki-laki lebih dominan dalam hal pengambilan keputusan. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam hal pengambilan keputusan masih sangat rendah. hal ini dikarenakan kontrol kekuasaan dipegang oleh laki-laki dalam LKM maupun KSM.

Di program air bersih partisipasi baik perempuan maupun laki-laki dapat dilihat dari pelaksanaan program. Kultur masyarakat yang masih memegang budaya gotong-royong, sehingga dalam pengerjaanya hampir seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengerjaanya.

Program Masalah pemeliharaan lingkungan yang paling memiliki peran besar adalah perempuan seperti pengelolaan sampah, selain dalam penanganan masalah lingkungan partisipasi antara laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari program penanganan bencana kebakaran. Sesi pemberian materi terkait penggunaan alat pemadam kebakaran ini dihadiri oleh 9 perempuan dan 17 laki-laki. Di sini dapat dilihat bahwa cukup banyak perempuan yang mengikuti pelatihan ini. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan sudah memiliki andil dan

juga berpartisipasi aktif dalam program. Berdasarkan hasil observasi juga bahwa dari 9 perempuan yang ikut pelatihan bukan dari anggota KSM atau LKM. Dalam praktik bukan hanya pihak laki-laki yang mempraktikkan namun perempuan juga ikut dalam praktik ini, bahkan jumlah perempuan yang ikut dalam sesi ini bertambah menjadi 14 orang. Jadi disini perempuan tidak hanya melihat saja, namun juga berpartisipasi langsung.

c. Segi Kontrol

Segi kontrol dilihat dari kepemimpinan LKM maupun KSM. Pemilihan kedudukan atau jabatan dalam LKM juga dilakukan berdasarkan musyawarah, dan yang menjadi ketua di LKM ini adalah laki-laki. Alasan pemilihan ketua seorang laki-laki karena mereka dianggap lebih tahu terkait kondisi lapangan dan yang berkaitan dengan keuangan biasanya dipegang oleh perempuan karena dianggap lebih bisa memmanagement uang dan lebih teliti, dari situ dapat dilihat bahwa masih ada stereotip yang melabeli antara laki-laki dan perempuan, selain itu program pemberdayaan 100-0-100 ini banyak berkaitan dengan infrastruktur maka banyak anggapan bahwa laki-laki lebih cocok sebagai ketua. Perempuan dianggap kurang mampu untuk menjadi ketua karena kurangnya pengetahuan

terkait infrastruktur, selain itu karena banyak program atau kegiatan yang sampai malam perempuan banyak yang dilarang keluar, karena di kelurahan Jaraksari perempuan keluar terlalu malam masih di anggap tidak baik.

Polemik ini juga terjadi dalam kepemimpinan KSM. Semua kepemimpinan KSM diketuai oleh laki-laki. Dampak yang muncul akibat hal tersebut yaitu dimana suara laki-laki lebih dominan dalam pemberdayaan yang dilaksanakan. Seperti dalam pelaksanaan MP2K dalam pembahasan masalah pelatihan kebakaran, semua keputusan berasal dari laki-laki. LKM maupun di KSM kebanyakan jabatan perempuan didapat melalui penunjukan sehingga selama 2 tahun baru ada 1 KSM yang ketuanya perempuan, namun itu juga tidak bertahan lama dan hal tersebut mempersulit mobilitas perempuan untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Menjadi permasalahan juga seolah-olah kedudukan perempuan di dalam KSM maupun LKM sudah ditentukan yaitu menjadi sekretaris atau bendahara karena hal itu dianggap identik dengan pekerjaan perempuan.

Jika melihat dari segi analisis diatas dapat dikatakan penerapan responsif gender ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik karena masih ada

beberapa hal yang belum tercapai dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terkait makna responsif gender sendiri. Masyarakat masih menganggap bahwa responsif gender hanya dilihat dari segi partisipasi perempuan saja. Jadi jika perempuan sudah berpartisipasi sudah dianggap responsif gender.

Hal ini juga berimbas dalam pemberdayaan yang dilaksanakan terutama dalam kepengurusan LKM maupun KSM, dimana demi memenuhi kuota yang ditentukan yaitu 30% pengurus adalah perempuan agar dapat dikatakan responsif gender, sehingga banyak perempuan yang ikut hanya untuk memenuhi kuota tersebut. Istilahnya hanya untuk formalitas saja tanpa melihat dan memperhatikan kontribusi mereka. Dapat dikatakan mereka masih melihat responsif gender dari segi kuantitas keterlibatan perempuan dan keterwakilan perempuan sendiri menjadi standar responsif gender. Seyogyanya program yang responsif gender bukan hanya dilihat dari segi partisipasi saja namun juga terkait kebutuhan akomodasi lainya seperti akses, manfaat, dan juga kontrol.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penerapan responsif gender dalam tahapan sosialisasi ini dilakukan

dengan mengundang perwakilan dari laki-laki dan juga perempuan. Hal ini agar aspirasi dari keduanya dapat tersalurkan. Proses sosialisasi ini keterwakilan antara laki-laki dan perempuan sudah seimbang.

Terkait lembaga masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan 100-0-100, penerapan responsif gender dilakukan secara mutlak dan dapat dikatakan hal ini wajib. Terkait pembentukan lembaga tersebut terdapat peraturan bahwa perempuan harus terlibat minimal 30% dari jumlah pengurus. Keterlibatan perempuan dapat dikatakan lebih dari 30% dimana rata-rata anggota LKM dan KSM antara 5-19 dengan jumlah anggota wanita antara 3-9 di setiap LKM dan KSM.

Didalam keanggotaan LKM maupun KSM perempuan sudah terlibat, dapat dikatakan mereka belum berpartisipasi secara maksimal. Hal ini terjadi karena kebanyakan perempuan yang terlibat didalam KSM maupun LKM karena ditunjuk bukan karena hasil musyawarah maupun keinginan sendiri. Hal ini juga mengakibatkan banyak anggota perempuan yang tidak aktif dalam kepengurusan terutama dalam lembaga KSM, karena mereka bukan atas keinginan sendiri. Adanya penunjukan, ini dapat membatasi masyarakat yang ingin berpartisipasi

terutama untuk kedepannya, selain itu yang membuat partisipasi perempuan rendah dalam kepengurusan adalah adanya tradisi bahwa perempuan tidak baik untuk melakukan kegiatan diluar rumah dimalam hari sedangkan banyak kegiatan KSM yang dilaksanakan sampai malam.

Didalam KSM mupaun LKM pemegang kontrol atau jabatan tertinggi masih di pegang oleh laki-laki dimana semua KSM ketuanya laki-laki, begitupula LKM. Kebanyakan mereka menganggap bahwa laki-laki lebih cocok untuk menjadi ketua karena mereka lebih paham terkait lingkungan dan masalah infrastruktur. Dengan ketuanya laki-laki ini juga mengakibatkan suara laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan seperti dalam MP2K yang membahas terkait masalah pelaksanaan program pelatihan kebakaran. Dimana kebanyakan usulan yang disepakati lebih banyak dari suara pihak laki-laki. Seperti ketentuan dana, tempat, dan peserta.

Di program Pembangunan ini melibatkan antara laki-laki dan perempuan, karena dalam pembangunan mereka melakukan secara gotong-royong. Hal ini juga dilakukan dalam program lingkungan kumuh dan juga sanitasi.

Jika melihat dari segi makna responsif gender sendiri dalam

pemberdayaan tersebut masih dikatakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat bahwa responsif gender hanya dilihat dari segi keterlibatan perempuan saja. Jika perempuan sudah terlibat sesuai dengan ketentuan maka di anggap responsif gender. Padahal responsif gender bukan hanya sekedar keadilan dari segi partisipasi saja namun juga terkait akomodasi yang lainnya seperti akses, kontrol, dan juga manfaat.

Terkait hasil dari keberhasilan pemberdayaan 100-0-100 tersebut dalam program air bersih sudah teratasi 98%. Sudah banyak masyarakat yang menikmati hasil program tersebut, untuk mengatasi masalah kumuh sudah teratasi sebesar 20 hektar dari jumlah 30 hektar kawasan kumuh. Terkait program sanitasi masih mengalami banyak kendala terutama terkait dana. Hal ini terjadi karena program ini yang paling banyak membutuhkan dana, namun juga masih banyak program-program yang berasal dari pemerintah, jadi tidak semua program yang dilaksanakan berasal dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat belum berdaya sepenuhnya karena mereka masih bergantung terhadap pemerintah baik dari segi program maupun dari segi dana. Sehingga ketika tidak ada songkongan dana dari pemerintah program tersebut

akan mengalami kendala, ditambah masih sedikit masyarakat yang mau melakukan swadaya sendiri dalam program yang ada.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah saran yang disimpulkan peneliti yaitu:

1. Saran Praktis

a. Kepada Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Wonosobo

Terkait pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kelurahan kurang memiliki andil yang banyak terhadap program tersebut karena hampir semua kegiatan terkait pemberdayaan diserahkan kepada LKM dan juga fasilitator. Agar program ini bisa berjalan dengan baik diharapkan pemerintah kelurahan dapat lebih aktif untuk memantau jalannya pemberdayaan tersebut, sehingga mereka tahu secara langsung bagaimana proses berjalannya program tersebut dan kendala apa yang dihadapi. Pemerintah kelurahan tidak hanya memantau jalannya program dari laporan pertanggungjawaban, karena disini yang memiliki kekuasaan terbesar adalah pemerintah kelurahan.

Bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo sendiri seharusnya tidak

terlalu terlibat dalam pembentukan program-program pemberdayaan, karena program yang ideal merupakan program yang semuanya berasal dari masyarakat itu sendiri dan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Jika program berasal dari pemerintah dan itu dilaksanakan di semua tempat, hal tersebut bisa saja mengalami ke gagalannya. Kebutuhan setiap lingkungan berbeda-beda dan belum tentu program itu cocok dilaksanakan. Selain itu juga dapat menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

b. LKM dan KSM

LKM dan juga KSM harus lebih banyak lagi memberikan ruang untuk perempuan ikut berpartisipasi. Bukan hanya sekedar berpartisipasi dalam segi jumlah namun juga berpartisipasi dalam segi aspirasi dan akomodasi lainnya. Masalah pelaksanaan program LKM dan KSM harus mematangkan program terlebih dahulu dan mengecek kembali kesiapan dalam pelaksanaan serta membuat program-program berdasarkan kebutuhan. Jangan terlalu mengandalkan pemerintah baik dari segi program maupun dana, karena pada dasarnya pemberdayaan itu berasal dari

masyarakat dan untuk masyarakat. Membuat planning program lain ketika program utama tidak bisa dijalankan.

2. Saran Akademik

Penelitian ini menfokuskan pada upaya penerapan responsif gender dalam program pemberdayaan 100-0-100, namun, peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini masih banyak hal-hal yang belum dibahas. Penelitian ini bisa dikembangkan lagi terkait bagaimana peran lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat kelurahan Jaraksari dalam pemberdayaan 100-0-100. Serta perubahan apa saja yang terjadi didalam masyarakat terkait dengan adanya program tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Efri, N., & Sitti, M. (2016). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Borneo Administrator*, 201-220.
- Mastuti, S., & Kemal, D. (2010). *Panduan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Bidang Perdagangan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kementerian Perdagangan.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rina, A., & Abdul, H. (2017). Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintahan Kota Palembang. *Al-Maiyyah*, 132-161.
- Rosadi, A. (2012). *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Tentang Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sardjunani, N. (2007). *Gender Analisis Pathway (GAP) Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Silvia, S. (2015, November). *Kota Tanpa Kumuh*. Retrieved from [kotaku.pu.go.id: http://kotaku.pu.go.id/view/3803/perencanaan-permukiman-yang-responsif-gender](http://kotaku.pu.go.id/view/3803/perencanaan-permukiman-yang-responsif-gender)
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsiar, P. (2017). Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 191-201.